KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Program Padat Karya : Top, PUPR Hidupkan Ekonomi Masyarakat
Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Program Padat Karya

Top, PUPR Hidupkan Ekonomi Masyarakat



Muhammad Iqbal

WAKIL Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengapresiasi program Padat Karya Tunai (*cash for work*) dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat daerah. Dewan menyarankan program tersebut lebih diperbanyak dan diperluas hingga pelosok daerah.

Iqbal mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat pedesaan. Seperti, pembangunan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Pembangunan infrastruktur program Kementerian PUPR, melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana sudah cukup bagus.

"Tujuan program PKT untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa agar diperbanyak dan perluas," katanya di Jakarta, kemarin.

Iqbal menilai, program pemeliharaan rutin infrastruktur yang telah dibangun melalui PKT juga sebaiknya melibatkan masyarakat.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Akan terjadi pemerataan pembangunan," katanya.

Politisi PPP menambahkan, pelaksanaan PKT ke depan perlu memperhatikan kualitas bukan hanya kuantitas.

Dia menyarankan, program ini juga diawasi masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Menurutnya, PKT harus mengutamakan azas kesetaraan dan mengurangi kesenjangan. Program tersebut juga tidak boleh mengganggu potensi ekonomi di daerah yang sudah berjalan baik.

"PKT diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat. Baik harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat di daerah," pungkasnya. ■ KAL